LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA
(018.09.0100.633961.KD)
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

AGROSTANDAR

Jalan Ragunan No.30 Pasar Minggu – Jakarta Selatan
Telp. 02178839949 Fax. 0217815020
Email : bsip.jakarta@pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Balai,

Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si.
NIP. 198303192005012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iv
Ringkasan Laporan Keuangan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3
II. Neraca 4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan 7
A. Penjelasan Umum 11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 15
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak 15
B.2. Belanja 16
B.3. Belanja Pegawai 16
B.4. Belanja Barang 17
B.5. Belanja Modal 17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 18
C.1. Aset Lancar 18
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 18
C.1.2. Piutang Bukan Pajak 18
C.1.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 19
C.1.4. Piutang Bukan Pajak (Netto) 19
C.1.5. Persedian 19
C.2. Aset Tetap 19
C.2.1. Tanah 19
C.2.2. Peralatan dan Mesin 19
C.2.3. Gedung dan Bangunan 20
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 20
C.2.5. Aset Tetap Lainnya 20
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 21
C.3. Aset Lainnya 21
C.3.1. Aset Lain-lain 21
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 22
C.4. Kewajiban Jangka Pendek 22
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga 22
C.4.2. Uang Muka dari KPPN 22
C.5. Ekuitas 23
C.5.1. Ekuitas 23
D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 24
D.1. Beban Pegawai 24
D.2. Beban Persediaan 24
D.3. Beban Barang dan Jasa 25
D.4. Beban Pemeliharaan 25
D.5. Beban Perjalanan Dinas 25
D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 26
D.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 27
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 27
E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 28
E.1. Ekuitas Awal 28
E.2. Surplus/Defisit-LO 28

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....28
E.4. Transaksi Antar Entitas 28
E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas 28
E.5. Ekuitas Akhir.....28
F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....29
F.1. Pengungkapan Lain-lain.....29
H. Lampiran.....30

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Balai,

Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si.
NIP. 198303192005012001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 77.663.680 atau mencapai 4.064,03% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 1.911.000.

Realisasi Belanja Negara pada Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.813.389.444 atau mencapai 92,36% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.211.759.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 101.314.738.052 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 80.995.010; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 101.233.743.042; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 16.870.102 dan Rp. 101.297.867.950.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.911.600, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 5.030.782.037 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -5.028.870.437. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp. 152.775.000 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp. 0 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp. 152.775.000. Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 0 dan Defisit Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -4.876.095.437.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal

pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 101.438.237.623 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -4.876.095.437 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.735.725.764 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 101.297.867.950.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.911.000	77.663.680	4.064,03	11.947.700
Jumlah Pendapatan		**1.911.000**	**77.663.680**	**4.064,03**	**11.947.700**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	2.460.575.000	2.409.589.901	92,96	2.287.930.274
Belanja Barang	B.4.	2.751.184.000	2.411.200.677	93,07	2.698.755.113
Belanja Modal	B.5.	0	0	0	100.000.000
Jumlah Belanja		**5.211.759.000**	**4.813.389.444**	**92,36**	**5.086.685.387**

II. NERACA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAKARTA

NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	77.022.920	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	(385.115)	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.4.	76.637.805	0
Persediaan	C.1.5.	4.357.205	240.000
Jumlah Aset Lancar		**80.995.010**	**240.000**
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	96.574.001.000	96.574.001.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	4.351.022.708	4.531.766.612
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.706.735.000	5.706.735.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.582.000	2.582.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	3.273.000	3.273.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(5.403.870.666)	(5.349.222.501)
Jumlah Aset Tetap		**101.233.743.042**	**101.469.135.111**
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	696.212.952	208.469.048
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(696.212.952)	(208.469.048)
Jumlah Aset Lainnya		**0**	**0**
Jumlah Aset		**101.314.738.052**	**101.469.375.111**
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	16.870.102	31.137.488
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**16.870.102**	**31.137.488**
Jumlah Kewajiban		**16.870.102**	**31.137.488**
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	101.297.867.950	101.438.237.623
Jumlah Ekuitas		101.297.867.950	**101.438.237.623**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**101.314.738.052**	**101.469.375.111**

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.911.600	11.947.700
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.386.415.767	2.303.703.274
Beban Persediaan	D.3.	75.943.338	90.415.940
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.470.934.587	1.573.406.465
Beban Pemeliharaan	D.5.	535.814.754	455.736.425
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	325.896.407	586.396.625
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	120.652.277	325.829.249
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	385.115	0
JUMLAH BEBAN		**(5.030.782.037)**	**(5.335.487.978)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**5.028.870.437**	**5.323.540.278**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	152.775.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12.	**152.775.000**	**0**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**4.876.095.437**	**5.323.540.278**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	101.438.237.623	101.687.040.214
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(4.876.095.437)	(5.323.540.278)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	4.735.725.764	5.074.737.687
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(140.369.673)	(248.802.591)
EKUITAS AKHIR	E.6.	101.297.867.950	101.438.237.623

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta

Pembangunan pertanian memerlukan standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta yang disingkat penyebutannya menjadi BSIP Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta. BSIP Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada unit eselon I Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian melalui koordinasi Balai Besar Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BBSIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, BPSIP DKI Jakarta memiliki tugas pokok yaitu: melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.

BPSIP DKI Jakarta menjalankan fungsinya meliputi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
9. dan Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah tangga BPSIP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
  /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang egara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (Tahun)**
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta telah mengadakan 8 (Delapan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.911.000	1.911.000
Jumlah Pendapatan	**1.911.000**	**1.911.000**
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.526.285.000	2.339.920.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	64.069.000	64.069.000
Belanja Lembur	56.586.000	56.586.000
Belanja Barang Operasional	108.984.000	106.704.000
Belanja Barang Non Operasional	1.333.473.000	1.180.204.000
Belanja Barang Persediaan	72.700.000	84.392.000
Belanja Jasa	308.150.000	312.829.000
Belanja Pemeliharaan	499.560.000	499.560.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	633.200.000	569.710.000
Jumlah Belanja	**5.603.007.000**	**5.213.974.000**

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 77.663.680 atau mencapai 4.064,03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.911.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	**Estimasi**	**Realisasi**	**%**
Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	75.752.080	∞
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.911.000	1.911.600	100,03
Jumlah	**1.911.000**	**77.663.680**	**4.064,03**

Realisasi Pendapatan pada bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dan bulan Desember Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 77.663.680 dan Rp. 11.947.700. Realisasi Pendapatan pada Tahun 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan Pendapatan pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh karena pada Tahun 2024 terdapat Penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Pengembalian Tunjangan Fungsional Peneliti sebesar Rp. 75.752.080.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada bulan Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.813.389.444 atau 92,36% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.211.759.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
Belanja Pegawai	2.460.575.000	2.409.589.901	97,93
Belanja Barang	2.751.184.000	2.411.200.677	87,64
Belanja Modal	0	0	
Total Belanja Kotor	**5.211.759.000**	**4.820.790.578**	92,50
Pengembalian Belanja	**0**	**7.401.134**	
Total Belanja	**5.211.759.000**	**4.813.389.444**	**92,36**

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 5,37% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya meliputi Belanja Pegawai naik 5,32% yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan penambahan PPPK sebanyak 1 orang. Sedangkan Belanja Barang turun 10,66% karena pada Tahun 2024 terdapat kegiatan yang sebagian anggarannya diblokir yaitu kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Pegawai	2.402.188.767	2.287.930.274	4,99
Belanja Barang	2.411.200.677	2.698.755.113	-10,66
Belanja Modal	0	100.000.000	-100,00
Total Belanja	4.813.389.444	5.086.685.387	-5,37

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.402.188.767 dan Rp. 2.287.930.274. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,93% dari bulan Desember Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kenaikan gaji PNS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

dan penambahan PPPK sebanyak 1 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.292.189.557	2.235.802.210	2,52
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	64.069.000	16.345.064	291,98
Belanja Lembur	56.485.000	35.783.000	57,85
Jumlah Belanja Kotor	2.412.743.557	2.287.930.274	5,46
Pengembalian Belanja Pegawai	7.401.138	0	∞
Jumlah Belanja	2.405.342.419	2.287.930.274	5,13

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.411.200.677 dan Rp 2.698.755.113. Realisasi belanja barang pada bulan Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 10,66% dari bulan Desember Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan Tahun 2024 terdapat kegiatan yang sebagian anggarannya diblokir yaitu kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	106.701.170	107.130.000	-0,40
Belanja Barang Non Operasional	1.100.189.735	1.233.082.674	-10,78
Belanja Barang Persediaan	87.987.940	87.050.410	1,08
Belanja Jasa	262.538.068	232.296.949	13,02
Belanja Pemeliharaan	527.887.357	452.798.455	16,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	325.896.407	586.396.625	-44,42
Jumlah Belanja Kotor	2.411.200.677	2.698.755.113	-10,66
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	2.411.200.677	2.698.755.113	-10,66

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 100.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada bulan Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan bulan Desember Tahun Anggaran 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal pada Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100.000.000	-100
Jumlah Belanja Kotor	**0**	0	**-100**
Pengembalian Belanja Barang	**0**	100.000.000	0
Jumlah Belanja	**0**	0	**-100**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening Bank	0	0
Kuitansi UP yang belum di SPMkan	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.022.920 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya/ Rincinan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	77.022.920	0
Jumlah	**77.022.920**	**0**

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 77.022.920 berasal dari pengembalian belanja tunjangan fungsional Peneliti yang beralih ke Analis Standardisasi dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Per 31 Desember 2024 (Rp.)	Jangka Waktu (Bulan)
drh. Neng Risris Sudolar, M.Sc	21.675.000	18
Ikrarwati, SP, M.Si	16.954.170	18
Erna Puji Astuti, SP, M.Sc	10.725.000	18
Lukman Hakim, S.Si, M.Sc	9.750.000	18
Budiyantoro, S.TP, M.Sc	9.912.500	18
Wylla Sylvia Maharani, SP, MM	8.006.250	12
Jumlah	**77.022.920**	

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 385.115 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tersebut adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	77.022.920	0.5	385.115
Kurang Lancar	0	10	0
Diragukan	0	50	0
Macet	0	100	0
Jumlah	**77.022.920**		**385.115**

C.1.4. Piutang Bukan Pajak (NETTO)

Piutang Bukan Pajak (NETTO) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.637.805 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak (NETTO) berasal dari Piutang Bukan Pajak dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Rincinan Piutang Bukan Pajak (NETTO) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	77.022.920	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(385.115)	0
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	**76.637.805**	**0**

C.1.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.357.205 dan Rp. 240.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Awal Barang Persediaan per 31 Desember 2023 merupakan Barang Konsumsi dan Saldo per 31 Desember 2024 merupakan Barang Konsumsi. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	4.357.205	240.000
Jumlah	**3.345.961**	**240.000**

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 96.574.001.000 dan Rp. 96.574.001.000. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen

Pertanian Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.351.022.708 dan Rp. 4.531.766.612.

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 307.000.000 dan terdapat mutasi kurang sebesar Rp. 487.743.904. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	**4.531.766.612**
B. Mutasi Tambah	**307.000.000**
Transfer Masuk	307.000.000
C. Mutasi Kurang	**-487.743.904**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-487.743.904
D. Saldo Akhir	**4.351.022.708**

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp. 307.000.000 berasal dari Transfer masuk 1 (Satu) Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dari Sekretariat BSIP Kementerian Pertanian senilai Rp. 307.000.000.

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp. 487.743.904 berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp. 487.743.904 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume		Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	196.540.000
2	Sepeda Motor	2	Unit	21.975.800
3	P.C Unit	9	Buah	78.353.104
4	Note Book	15	Buah	122.329.000
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Buah	32.296.000
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	11.400.000
7	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	Dummy	1.750.000
8	Server	1	Buah	22.000.000
9	Hub	1	Buah	1.100.000
TOTAL		**44**		**487.743.904**

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.706.735.000 dan Rp. 5.706.735.000. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.582.000 dan Rp. 2.582.000. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.273.000 dan Rp. 3.273.000. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebanyak 31 Buku. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 30 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. – 5.403.870.666 dan Rp. -5.349.222.501. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	4.351.022.708	-4.232.054.208	118.968.500
2.	Gedung dan Bangunan	5.706.735.000	-1.171.439.315	4.535.295.685
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.582.000	-377.143	2.204.857
4.	Aset Tetap Lainnya	3.273.000	0	3.273.000
Akumulasi Penyusutan		10.063.612.708	-5.403.870.666	4.659.742.042

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 696.212.952 dan Rp. 208.469.048. Terdapat mutasi penambahan atas nilai Aset Lain-lain sebesar 487.743.904. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 487.743.904 namun ttidak erdapat kurang. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	**208.469.048**
B. Mutasi Tambah	**0**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	**487.743.904**
C. Mutasi Kurang	**0**
D. Saldo Akhir	**696.212.952**

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp. 487.743.904 berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp. 487.743.904 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume		Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	196.540.000
2	Sepeda Motor	2	Unit	21.975.800
3	P.C Unit	9	Buah	78.353.104
4	Note Book	15	Buah	122.329.000
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Buah	32.296.000
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	11.400.000
7	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	Dummy	1.750.000
8	Server	1	Buah	22.000.000
9	Hub	1	Buah	1.100.000
TOTAL		**44**		**487.743.904**

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. -696.212.952 dan Rp -208.469.048.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	696.212.952	-696.212.952	0
Akumulasi Penyusutan		**696.212.952**	**-696.212.952**	**0**

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.870.102 dan Rp. 31.137.488. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	15.773.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	16.870.102	15.364.488
Jumlah	**16.870.102**	**31.137.488**

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Belanja Langganan Daya dan Jasa (Telepon Bulan Desember 2024)	165.279
Belanja Langganan Daya dan Jasa (Listrik Bulan Desember 2024)	16.704.823
Jumlah	16.870.102

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 101.297.867.950 dan Rp. 101.438.237.623. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.386.415.767 dan Rp. 2.303.703.274. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.572.122.100	1.521.639.700	3,32
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.155	19.982	15,88
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	127.757.700	116.430.760	9,73
Beban Tunj. Anak PNS	35.938.950	33.556.212	7,10
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	16.380.000	53,85
Beban Tunj. Fungsional PNS	132.600.000	193.350.000	-31,42
Beban Tunj. PPh PNS	16.559.994	8.040.776	105,95
Beban Tunj. Beras PNS	87.628.200	91.176.780	-3,89
Beban Uang Makan PNS	232.381.000	230.466.000	0,83
Beban Tunjangan Umum PNS	38.804.324	40.515.000	-4,22
Beban Gaji Pokok PPPK	44.850.400	11.866.000	277,97
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.064	384	177,08
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7.280.000	2.080.000	250,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.013.880	289.680	250,00
Beban Uang Makan PPPK	7.770.000	2.109.000	268,42
Beban Uang Lembur	56.485.000	35.783.000	57,85
Jumlah	**2.386.415.767**	**2.303.703.274**	**3,59**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.402.188.767. Jika dibandingkan dengan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka terdapat selisih sebesar Rp. 15.773.000. Selisih sebesar Rp. 15.773.000 berasal dari pembayaran Belanja Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 15.773.000.

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 75.943.338 dan Rp. 93.353.910. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	1.318.000	992.200	32,84
Beban Persediaan konsumsi	74.625.338	89.423.740	-16,55
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		2.937.970	-100,00
Jumlah	**75.943.338**	**93.353.910**	**-18,65**

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 87.987.940. Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka terdapat selisih sebesar Rp. 12.044.602. Selisih sebesar Rp. 12.044.602 berasal dari Belanja Barang Persediaan sebesar Rp. 7.927.397 masuk ke dalam Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan, ditambah saldo akhir (sisa) Barang Persediaan sebesar Rp. 4.357.205 dikurangi saldo awal Barang Persediaan sebesar Rp. 240.000.

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.470.934.587 dan Rp. 1.573.406.465. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31.917.170	34.200.000	-6,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	74.784.000	72.930.000	2,54
Beban Bahan	1.047.767.375	1.194.630.974	-12,29
Beban Barang Non Operasional Lainnya	52.422.360	38.451.700	36,33
Beban Langganan Listrik	185.550.619	178.002.158	4,24
Beban Langganan Telepon	1.983.348	1.983.348	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	31.759.715	26.808.285	18,47
Beban Sewa	12.750.000	0	∞
Beban Jasa Profesi	32.000.000	26.400.000	21,21
Jumlah	**1.470.934.587**	**1.573.406.465**	**-6,51**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.469.428.973. Jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka terdapat selisih sebesar Rp. 1.505.614. Selisih sebesar Rp. 1.505.614 berasal dari Belanja Langganan Telepon bulan Desember 2024 yang dibayar pada Bulan Januari 2025 sebesar 165.279 dan Belanja Langganan Telepon bulan Desember 2024 yang dibayar pada Bulan Januari 2025 sebesar Rp. 16.704.823; dikurangi Belanja Langganan Telepon bulan Desember 2023 yang dibayar pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 165.279 dan Belanja Langganan Listrik bulan Desember 2023 yang dibayar pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 15.199.209.

D.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 535.814.754 dan Rp. 455.736.425. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	273.853.303	254.005.620	7,81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	254.034.054	198.792.835	27,79
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.927.397	2.937.970	169,83
Jumlah	**535.814.754**	**455.736.425**	**17,57**

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 527.887.357. Jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, maka terdapat selisih sebesar Rp. 7.927.397. Selisih sebesar Rp. 7.927.397 berasal dari Belanja Barang Persediaan sebesar Rp. 7.927.397 masuk ke dalam Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 325.896.407 dan Rp 586.396.625. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	175.996.407	432.536.625	-59,31
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.900.000	153.860.000	-2,57
Jumlah	**325.896.407**	**586.396.625**	**-44,42**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 325.896.407. Tidak terdapat selisih antara Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan Beban Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 235.392.069 dan Rp. 325.829.249. Beban penyusutan adalah merupakan beban

untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.979.022	182.355.025	-70,95
Beban Penyusutan Irigasi	58.022	58.022	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	182.355.025	143.416.202	27,15
Jumlah	**235.392.069**	**325.829.249**	**-43,80**

D.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 385.115 dan Rp. 0. Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	385.115	0	∞
Jumlah	**385.115**	**0**	∞

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	152.775.000	0	∞
Jumlah	**152.775.000**	**0**	∞

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 101.438.237.623 dan Rp. 101.687.040.214.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. -4.876.095.437 dan Rp. -5.335.487.978. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.735.725.764 dan Rp. 5.074.737.687. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.813.389.444
Diterima dari Entitas Lain	77.663.680
Jumlah	4.735.725.764

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp. 77.663.680 sedangkan DKEL sebesar Rp. 4.813.389.444.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 101.297.867.950 dan Rp. 101.438.237.623.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Bab VII tentang Pengintegrasian dijelaskan bahwa pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil kementerian/lembaga menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BRIN.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 7 Peneliti BPTP DKI Jakarta mutasi pindah ke BRIN sedangkan 10 Peneliti BPTP DKI Jakarta beralih jabatan menjadi Pejabat Fungsional Tertentu Analis Standarisasi (AST). Peralihan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti sebesar Rp 152.775.000 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pegawai	Besar Kelebihan Tunjangan (Rp.)
drh. Neng Risris Sudolar, M.Sc	23.475.000
Cherry Soraya Ammatillah, SP, M.Si	23.475.000
Ikrarwati, SP, M.Si	23.475.000
Nofi Anisatun Rokhmah, SP, M.Si	13.725.000
Erna Puji Astuti, SP, M.Sc	13.725.000
Lukman Hakim, S.Si, M.Sc	13.725.000
Budiyantoro, S.TP, M.Sc	13.725.000
Wylla Sylvia Maharani, SP, MM	13.725.000
Susi Sutardi, SP	13.725.000
Jumlah	**152.775.000**

Target Capaian Ouput BPSIP DKI Jakarta pada Tahun 2024 telah tercapai 100 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)					GAP	Kode Ket	PN
					Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	s.d Bulan Desember 2024					
										RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)			
1	EC	6916	ADA114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100.000.000	93.657.916	93,66	1	Standar	1	1	100	6,34	00	Non PN
2	EC	6916	BDB101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	182.000.000	174.910.906	96,1	1	Lembaga	1	1	100	3,9	00	Non PN
3	EC	6916	BJA110	Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji	1.395.000	1.395.000	100	1	Produk	1	1	100	0	00	Non PN
4	HA	6915	CAG101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	130.332.000	130.279.837	99,96	5	Unit	5	5	100	0,04	00	Non PN
5	WA	6918	EBA956	Layanan BMN	31.753.000	8.190.424	25,79	1	Layanan	1	1	100	74,21	01	Non PN
6	WA	6918	EBA962	Layanan Umum	219.080.000	106.518.450	48,62	1	Layanan	1	1	100	51,38	01	Non PN
7	WA	6918	EBA994	Layanan Perkantoran	4.204.559.000	4.153.298.004	98,78	1	Layanan	1	1	100	1,22	00	Non PN
8	WA	6918	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	218.750.000	95.565.784	43,69	1	Layanan	1	1	100	56,31	01	Non PN
9	WA	6918	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	56.290.000	26.950.000	47,88	1	Layanan	1	1	100	52,12	01	Non PN
10	WA	6918	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	67.600.000	30.024.257	44,41	1	Layanan	1	1	100	55,59	01	Non PN